

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

RENCANA KERJA

TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan RKT OPD ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja Tahunan.(RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Painan, Juli 2022
Kepala Dinas

BERISKHAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19720302 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahunan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen RKT sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RKT OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 halaman 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan urusan PTSP dan Penanaman Modal selama 1 (satu) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPISP dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang /Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengujiang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengujiang urusan perangkat daerah	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	90 %	100 %
18	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pengujiang urusan perangkat daerah tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	90 %	100 %
18-01	Suc Kegiatan									
18-01-202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 bulan	1.557.175,21	95,46%	1.658.985.916	99,16%	100%	100 %	100 %

2	18 01 2 02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	82.700.000	98,34%	72.589.000	86,54%	100%	98%	97,42%
2	18 01 2 02	02	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0
2	18 01 2 06		Sub Kegiatan									
2	18 01 2 06	01	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	39.941.400	99,92%	13.805.250	98,98%	100%	98%	100%
2	18 01 2 06	04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang perangkat daerah								
2	18 01 2 06	05	Sub Kegiatan									
2	18 01 2 06	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	12 bulan	18.531.000	99,28%	9.025.800	99,32	100%	95%	100%
2	18 01 2 06	08	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	35.800.000	99,17%	136.239.500	99,98%	100%	100%	100%
2	18 01 2 06	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	32.024.000	99,95%	36.403.600	98,48	100%	100%	100%
2	18 01 2 07		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	12 bulan	23.865.250	99,76%	21.308.000	99,20%	100%	97%	100%
2	18 01 2 07	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	2 buah	18.240.000	96,51%	8.480.000	99,76	2 buah	100%	100%
2	18 01 2 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	25.742.500	98,82%	18.262.500	98,03%	12 bulan	100%	100%
2	18 01 2 08	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12 bulan	43.485.080	99,57%	35.266.039	100%	12 bulan	96%	100%

2	18	01	2.08	04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	18	01	2.09		Sub Kegiatan												
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 bulan	36.034.228	89,37%	56.097.740	87,11%	12 Bulan	100 %	100 %			
2	18	01	2.09	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	151.406.000	99,99%	121.400.784	86,58%	12 Bulan	100 %	100 %			
2	18	02			Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	18	02	2.01		Sub Kegiatan												
2	18	02	2.01	01	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2	18	02	2.01	05	pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	12 bulan	0	0	0	0	12 bulan	100 %	100 %			100 %
2	18	02	2.01	06	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	15.800.000	100%	9.400.000	100%	12 Bulan	100 %	100 %			100 %
2	18	02	2.01	12	Sub Kegiatan												
2	18	03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	12 Bulan	96.400.452	99,71	118.928.000	99,96	12 Bulan	100 %	100 %			100 %
2	18	03	2.02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0	0	0	0	0	12 bulan	95,90 %	100 %			100 %
2	18	03	2.02	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 Bulan	23.832.272	99,93%	44.250.000	100%	12 Bulan	100 %	100 %			100 %

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan perizinan online	Penerbitan izin sesuai SOP	0	0	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	0	Penerbitan izin sesuai SOP	100 %	100 %
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah masyarakat yang terlayani	150 izin	23.974.600	98,32	Jumlah masyarakat yang terlayani	0	150 izin	97 %	100 %
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan penguatan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah masyarakat yang terlayani	0	0	0	Persentase pelayanan perizinan online	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif	Persentase pelayanan perizinan online	Standar kualitas pelayanan perizinan	0	0	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi penanaman modal	0	Standar kualitas pelayanan perizinan	0	0
PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pengendalian Investasi Daerah	12 bulan			Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penanaman modal				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian investasi yang Bermasalah	12 bulan							
Sub Kegiatan					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi				

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Urusan Penanaman Modal dan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 dengan 5 (lima) Program dan 12 (Dua belas) Kegiatan dan terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.487.737,- dan terealisasi sebesar Rp.3.744.883.995,- atau 83.21 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.750.035.449,- dengan realisasi Rp.3.253.354.481,- persentase keuangan 86,75 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa lancarnya pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.537.803,- dengan realisasi Rp.37.016.560,- persentase keuangan 83.11 %, keluarannya berupa Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.693.479.212,- dengan realisasi Rp.2.235.674.049,- persentase keuangan 83.00 %, keluarannya berupa terpenuhinya administrasi keuangan ASN.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 438.521.350,- dengan realisasi Rp.374.851.340,- persentase keuangan 85.48 %, keluarannya berupa persentase tertib administrasi umum Perangkat daerah.

d. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.601.350,- dengan realisasi Rp. 32.146.000,- persentase keuangan 95.46 %, keluarannya berupa persentase ketersediaan barang barang milik daerah sesuai dengan perencanaan.

e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.474.537,- dengan realisasi Rp. 249.080.356,- persentase keuangan 90,09 %, keluarannya berupa Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah..

f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263,421,200,- dengan realisasi Rp. 243,930,520,- persentase keuangan 99,60 %, keluarannya berupa persentase barang milik daerah yang berkondisi baik.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.117.241.970,- dengan realisasi Rp. 101.760.770,- persentase keuangan 99.15. %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya Peningkatan peluang investasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :

a. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.037.370,- dengan realisasi Rp. 75.194.420,- persentase keuangan 83.51%, keluarannya berupa regualsi tentang penyelenggaraan perizinan di daerah.

b. Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten /Kota

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.204.600,- dengan realisasi

Rp. 26.566.350,- persentase keuangan 97,65 %, keluarannya berupa peta potensi dan peluang investasi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 182.859.800,- dengan realisasi Rp.177.671.080,- persentase keuangan 97.16%, keluaran berupa Jumlah minat invetsasi.

Adapun kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal yaitu:

a. Kegiatan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 182.859.800,- dengan realisasi Rp. 177.671.080,- persentase keuangan 97.16 %, keluaran berupa meningkatnya minat investasi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 70.122940,- dengan realisasi Rp. . 67.245.760,- persentase keuangan 95.89 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Terpenuhinya standar minimal pelayanan perizinan.

Adapun kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu:

a. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.122940,- dengan realisasi Rp. 67.245.760,- persentase keuangan 95.89%, keluarannya berupa terlaksananya Penerbitan izin sesuai dengan SOP

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 380.225.507.558,- dengan realisasi Rp. 225.507.558,- persentase keuangan 59.30%, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Hasil/keluarannya berupa terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKPM Provinsi, Terlaksananya Operasional Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

Adapun kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu:

- a. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 380.225.507.558,- dengan realisasi Rp. 225.507.558,- persentase keuangan 59.30%, keluarannya berupa Meningkatnya iklim investasi dan realisasi penanaman modal.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8,366,300,- dengan realisasi Rp. 8,366,300,- persentase keuangan 100%, keluarannya berupa terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 3.791.856.741 terurai dalam 5 Program dan 11 Kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai **"VISI". MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DI DUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempunyai **"MISI"** 1 dan 3, yaitu : 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Sedangkan Misi 3 Yaitu : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DPMPSTSP Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (per tahun)			17	19	21	23	25	26	28	17	49	21	23
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)			N/A	200,000,000,000	310,000,000,000	372,000,000,000	446,400,000,000	536,680,000,000	642,816,000,000	704.435.368.737	1.767.753.342.797	310,000,000,000	372,000,000,000
Indeks Kepuasan Masyarakat			N/A	80 %	82 %	84 %	85 %	85 %	85 %	80,50	84 %	82 %	84 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan.

5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini

TABEL 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Pesisir Selatan

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah		100 %	3.101.034.261	APBD		100 %	3.992.890.291
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Sub Kegiatan								
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menr gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganmya	IV Jurai	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	2.148.734.869	APBD	Rutinitas	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	2.992.890.291
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	IV Jurai	terbayarnya honorarium kegiatan	141.720.810	APBD	Rutinitas	terbayarnya honorarium kegiatan	135.938018

			Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah							
			<i>Sub Kegiatan</i>								
		3	<i>Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kab. Pessel	Terselesaikannya laporan capaian kinerja OPD	32.754.670	APBD	Rutinitas	Terselesaikannya laporan capaian kinerja OPD	32.754.670
		4	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Kab. Pessel	Terselesaikannya dokumen laporan perencanaan OPD				Terselesaikannya dokumen laporan perencanaan OPD	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan							
			<i>Sub Kegiatan</i>								
2		5	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	IV Jurai	Tersedianya komponen instalasi listrik	15.822.422		Rutinitas	Tersedianya komponen instalasi listrik	20.980.646
		6	<i>Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (dirinciengan menyebutkan nama BMD nya sesuai Jumlah)	IV Jurai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor di Bali	21.605.000	APBD	Rutinitas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor di Bali	81.605.000
4		7	<i>Penyediaan Bahan Logistik kantor</i>	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Ketersediaan alat tulis	24.254.730			Ketersediaan alat tulis	25.867.125

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.	IV Jurai	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	23,101,260	APBD	Rutinitas	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	25,867,125
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.	IV Jurai	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	APBD	Rutinitas	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	Kab. Pessel	Ketersediaan makan dan minum pegawai rapat dan tamu	10,230,000	APBD	Rutinitas	Ketersediaan makan dan minum pegawai rapat dan tamu	12,072,300
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Pessel	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta makan minum tamu	208,120,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta makan minum tamu	100,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan								
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan	IV Jurai	Terbayarnya air, listrik dan jasa komunikasi	100,282,180		Rutinitas	Terbayarnya air listrik dan jasa komunikasi	128,218,000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	IV Jurai	Terpeliharanya kebersihan kantor	135,491,300		Rutinitas	Terpeliharanya kebersihan kantor	135,491,300
	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan							

7											
			<i>Sub Kegiatan</i>								
	14	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	IV Jurai	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli				Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dibeli		
	15	pengadaan Mebel	Jumlah Mebel: atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	IV Jurai	jumlah mobiler yang dibeli	35,000,000	APBD	Rutinitas	jumlah mobiler yang dibeli	35,000,000	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik								
		<i>Sub Kegiatan</i>									
	16	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	IV Jurai	2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2	151,062,040		Rutinitas	2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2	151,062,040	
	17	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau Dapat juga digunakan untuk pengadaan peralatan olahraga	IV Jurai	perawatan Printer, AC dan peralatan lainnya	14,350,000		Rutinitas	perawatan Printer, AC dan peralatan lainnya	14,350,000	

	18	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	IV Jurai	1 Gedung	49,973,550		Rutinitas	1 Gedung	55,793,776
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Sub Kegiatan								
	19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	IV Jurai				Rutinitas		
	20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	IV Jurai				Rutinitas		
		Kegiatan Penataan Organisasi								
	21	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja aparatur		Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	50,000,000				50,000,000
		PROG. Pengembangan iklim penanaman modal	Peningkatan Peluang Investasi Daerah			56,000,000				56,000,000

		kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemutakhiran Peta Potensi dan Peluang Investasi							
		<i>Sub Kegiatan</i>								
	21	penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Tersedianya regulasi investasi daerah	IV Jurai	1 Perda	48,779,900		lanjutan	1 Perbup	50,000,000
		kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan Persektor							
		<i>Sub Kegiatan</i>								
	22	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Peta potensi dan peluang investasi	IV Jurai	1 dokumen	21,012,000		lanjutan	1 dokumen	26,000,000
	23	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyempurnaan Sistem Informasi Perizinan	IV Jurai						
		PROG. Promosi penanaman modal	Peningkatan Peluang Investasi Daerah			142,653,398				201,600,000
		kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemutakhiran Peta Potensi dan Peluang Investasi							
		<i>Sub Kegiatan</i>								

b. SOP Pencetakan dan Pemrosesan

24	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah pernyataan minat investasi	IV Jurai	3 surat pernyataan	21,000,000		lanjutan	3 surat pernyataan	21,000,000
25	pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Calon Investor Yang Didistribusi	IV Jurai	1 dokumen	123,653,398		lanjutan	1 dokumen	187,000,000
	PROC. Pelayanan Penanaman Modal	Terpenuhinya Standar Minimal Pelayanan Perizinan			70,001,592				187,000,000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya standar minimal pelayanan							
	Sub Kegiatan								
26	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelakunusaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	IV Jurai	4,200	40,001,572		lanjutan	4,250	110,000,000
27	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah masyarakat yang terlayani	IV Jurai	150 izin	30,000,000		lanjutan	300 izin	45,000,000
28	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengajuan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah masyarakat yang terlayani	IV Jurai						

29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif	Tingkatnya standar pelayanan minimal	IV Jurai					300 Customer	32.000.000
	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pengendalian Investasi Daerah							
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian investasi yang Bermasalah							
	<i>Sub Kegiatan</i>								
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Jurai	250 Pelaku usaha	379.175.000	lanjutan	250 Pelaku usaha	1.000.000	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Jurai	50 pelaku usaha	29.200.000	lanjutan	50 pelaku usaha	40.000.000	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Jurai			lanjutan	50 Investor	15.000.000	
	PROG. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan Data Perizinan yang Terintegrasi							
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan Persektor							

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah penanaman modal dan perizinan merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergi sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

[illegible]

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

3.1 Tujuan dan Telaahan terhadap kebijakan nasional

a. Tujuan

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategi lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Memperjelas arah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Memberikan transparansi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengadakan evaluasi kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi.
5. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan aparatur negara.

3.2 Tujuan, Sasaran dan Rencana Kerja DPMPTSP

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran strategis yang difokuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dalam proses pelayanan.
2. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Evaluasi Kinerja perangkat daerah.
 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 5. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.
 6. Penyediaan Bahan Logistik kantor.

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
11. pengadaan Mebel.
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROG. Pengembangan iklim penanaman modal

1. penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota.

III. PROG. Promosi penanaman modal

1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal
2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota.

IV. PROG. Pelayanan Penanaman Modal

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengakuan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif

V. PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

VI. PROG. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai urusan PTSP dan Penanaman Modal. Program-program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023**

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1		2	3	4	5	6
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah			3.992.890.291
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		<i>Sub Kegiatan</i>				
	1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji ASN dan tunjangan ASN	IV Jari	Terperolunya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.992.890.291
	2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi	IV Jari	Terperolunya pembayaran gaji dan tunjangan	133.933.018

				pelaksanaan tugas ASN		ASN		
				Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	Kab. Pessel	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	32.754.670
				Sub Kegiatan				
		3		Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	Kab. Pessel	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	32.754.670
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan			
				Sub Kegiatan				
2		4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	IV Jurai	Tersedianya komponen instalasi listrik	20,000,000
		5		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	IV Jurai	Jumlah paket Peralatan Gedung Kantor di Beli	81,605,000
4		6		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Ketersediaan bahan logistik	25,867,125
		7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	IV Jurai	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	25,867,125
		8		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	IV Jurai	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000
		9		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas	Kab. Pessel	Jumlah laporan fasilitas	12,072,300

				kunjungan tamu		kunjungan tamu	
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	Tersedianya pelayanan dinas dalam dan luar daerah serta makan minum tamu	100.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan				
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Terbayarnya air, listrik dan jasa komunikasi	128.218.000
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	IV Jurai	Terpeliharanya kebersihan kantor	135.491.300
			Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			
7			Sub Kegiatan				
		13	pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	IV Jurai	jumlah meubel yang dibeli	20.000.000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik			
			Sub Kegiatan				
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	IV Jurai	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	151.062.040

		Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizumannya			
	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya, yang dipelihara	IV Jura	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	14,350,000
	16	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/reha b yang dipelihara)	IV Jura	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	55,793,776
		Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah			
		Sub Kegiatan				
	17	Sub Kegiatan				
		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	IV Jura		50,000,000
		PROG. Pengembangan iklim penanaman modal	Peningkatan Peluang Investasi Daerah			205,000,000
		kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			
		Sub Kegiatan				
	18	penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah	IV Jura	IV Jura	15,000,000

		kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan Persektor			
		<i>Sub Kegiatan</i>				
	19	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Peta potensi dan peluang investasi	IV Jurai	1 dokumen	26,000,000
		PROG. Promosi penanaman modal	Peningkatan Peluang Investasi Daerah			
		kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemutakhiran Peta Potensi dan Peluang Investasi			
		<i>Sub Kegiatan</i>				
	20	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah pernyataan minat investasi	IV Jurai	3 surat pernyataan	21,000,000
	21	pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah pernyataan minat investasi	IV Jurai	1 kali promosi	180,000,000
		PROG. Pelayanan Penanaman Modal	Terpenuhinya Standar Minimal Pelayanan Perizinan			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP			
		<i>Sub Kegiatan</i>				
	22	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan	IV Jurai	4,250 t/m	110,000,000

			perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			
23		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	IV Juri	150 pelaku usaha	45.000.000
24		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	IV Juri	300 questioner	32.000.000
		PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pengendalian Investasi Daerah			406.000.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penyelesaian investasi yang Bermasalah			
		<i>Sub Kegiatan</i>				
25		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Juri	250 Pelaku usaha	1.000.000
26		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Juri	50 Pelaku usaha	40.000.000

		27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	IV Jurai	20 Investor	15,000,000
			PROG. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan Data Perizinan yang Terintegrasi			50,000,000
			Total				4,492,890,291

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 di susun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja sesuai urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal guna meningkatkan serta mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, Kegiatan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.


BUPATI PESIR SELATAN
RUSMA YUL ANWAR